

## PERAN *NETWORK GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KAMPUNG KERAMIK DINOYO KOTA MALANG

Nadhira Ghinaa Khalishaa<sup>1</sup>, Mohammad Paundra Tri Winata<sup>2</sup>, Iyola Yuanif<sup>3</sup>, Ratu Zahra<sup>4</sup>, Prisca Kiki Wulandari<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

#### Email:

[nadhiraghina27@student.ub.ac.id](mailto:nadhiraghina27@student.ub.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Kampung Keramik Dinoyo di Kota Malang merupakan salah satu sentra industri keramik tertua di Indonesia yang kini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan eksistensi dan daya saingnya sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran *network governance* dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kampung Keramik Dinoyo serta memberikan rekomendasi strategis untuk revitalisasi pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan masih terhambat oleh minimnya inovasi, kurangnya keterlibatan generasi muda, dan lemahnya promosi destinasi. Namun, adanya potensi kolaborasi lintas sektor dan penguatan partisipasi masyarakat lokal menjadi peluang untuk membentuk ekosistem pariwisata yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, strategi pengelolaan berbasis *network governance* dapat menjadi solusi dalam membangun sinergi antar aktor untuk mengembangkan pariwisata yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Network Governance, Kampung Keramik Dinoyo, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Revitalisasi, Kolaborasi*

### Abstract

*Dinoyo Ceramic Village in Malang City is one of the oldest ceramic industry centers in Indonesia which is now facing serious challenges in maintaining its existence and competitiveness as a community-based tourism village. This article aims to analyze the role of network governance in the development of community-based tourism in Dinoyo Ceramic Village and provide strategic recommendations for post-pandemic revitalization. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the development of the area is still hampered by minimal innovation, lack of involvement of the younger generation, and weak destination promotion. However, the potential for cross-sector collaboration and strengthening local community participation is an opportunity to form a more adaptive and sustainable tourism ecosystem. In conclusion, a network governance-based management strategy can be a solution in building synergy between actors to develop inclusive, innovative, and community empowerment-oriented tourism.*

**Keywords:** *Network Governance, Dinoyo Ceramic Village, Community-Based Tourism, Revitalization, Collaboration*

## LATAR BELAKANG

Kampung Keramik Dinoyo di Kota Malang adalah salah satu industri keramik tertua di Indonesia, yang telah beroperasi sejak tahun 1950-an. Awalnya, penduduk setempat memproduksi gerabah sederhana dari tanah liat putih berkualitas tinggi yang tersedia di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, para perajin lokal mulai memproduksi keramik porselen dengan desain yang semakin beragam dan sentuhan estetika yang halus. Dinoyo terus mengalami berbagai tantangan, namun tetap menjadi salah satu faktor ekonomi kreatif

terpenting di Kota Malang. Kawasan ini tidak hanya dikenal karena produk-produk berkualitas tingginya, tetapi juga sebagai salah satu destinasi edukatif yang berbasis pada kearifan lokal.

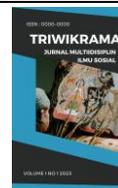
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kampung Keramik Dinoyo menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan industrinya maupun kesejahteraan penduduknya. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya keterlibatan generasi muda dalam kerajinan keramik karena dianggap kurang inovatif dan kurang berorientasi ekonomi dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, infrastruktur dan keterbatasan ruang menjadi faktor penting yang menghambat pengembangan kawasan ini sebagai desa wisata yang menarik. Meskipun bukan yang paling utama, lemahnya branding dan promosi juga menyebabkan potensi besar yang dimiliki Dinoyo kurang dikenal, bahkan di tingkat lokal.

Permasalahan ini semakin diperparah oleh data pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM secara nasional, termasuk Kampung Keramik Dinoyo. Selama masa pandemi, jumlah kunjungan menurun drastis, banyak galeri dan toko keramik yang terpaksa tutup, serta aktivitas produksi menjadi terbatas. Hal ini memberikan dampak jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat secara umum, terutama para pengrajin yang sangat mengandalkan interaksi langsung dengan wisatawan. Hingga saat ini, pertumbuhan sektor ini masih lambat dan belum sepenuhnya pulih, sehingga kebutuhan akan strategi baru untuk inovasi dan revitalisasi menjadi semakin mendesak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tarno Maryanto dan Amanah Rakhim Syahida (2019) dalam jurnal berjudul *Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Hasil Penjualan di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang* menekankan pentingnya penerapan strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan hasil penjualan produk kerajinan keramik. Studi tersebut mengidentifikasi sejumlah pendekatan promosi dan media sosial sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pasar serta membangun hubungan dengan pelanggan (Maryanto and Rakhim Syahida 2019).

Namun demikian, studi tersebut dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, sehingga belum mempertimbangkan dampak signifikan dari krisis kesehatan global terhadap sektor pariwisata dan UMKM secara keseluruhan, termasuk Kampung Keramik Dinoyo. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengkaji secara mendalam tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, ruang, dan lemahnya branding yang juga menjadi faktor penghambat pengembangan kawasan ini sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian terkait kebutuhan strategi komunikasi pemasaran yang tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga pada inovasi dan revitalisasi kawasan pasca-pandemi. Termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi digital secara lebih optimal, pendekatan kolaboratif lintas sektor, serta integrasi antara penguatan citra destinasi dan pemberdayaan pelaku lokal dalam ekosistem pariwisata yang lebih adaptif dan resilien (Amri, n.d.2020)

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Keramik Dinoyo, khususnya yang berkaitan dengan kelangsungan kerajinan tradisional dari masa ke masa. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat mendukung revitalisasi dan inovasi industri kerajinan lokal. Dengan berfokus pada pemahaman kondisi industri lokal dan kebutuhan tenaga kerja setempat, diharapkan artikel ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata nasional, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan lokal Indonesia.



## KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah, Fitri Kurnianingsih, Chaereyranba Sholeh dengan judul “*Network Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang.” (Hasanah, Kurnianingsih, and Sholeh 2024), penelitian ini menggunakan tiga teori: Teori Governance (UNDP) yang mengutamakan kepentingan publik melalui kewenangan politik, ekonomi, dan administratif, dengan kelebihan partisipasi publik namun berisiko kompleksitas koordinasi; Teori Network Governance (Lay & Masudi) yang menyoroti keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam kerjasama kebijakan publik, memperluas keterlibatan aktor namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan Teori Pariwisata Berbasis Masyarakat yang memosisikan masyarakat sebagai pelaku aktif, memberdayakan secara berkelanjutan namun implementasinya bergantung pada kapabilitas masyarakat.

Penelitian kedua berjudul “Peran Jaringan Sosial Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Wisata Batik Girilayu, Kabupaten Karanganyar)” (Fada et al., 2023) memiliki kesamaan fokus pada relasi jaringan sosial antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal dalam pembangunan pariwisata. Penelitian ini menggunakan Teori Jaringan Sosial dari Mark Granovetter, yang menjelaskan bahwa tindakan ekonomi tidak terpisah dari struktur sosial dan menekankan prinsip norma, kekuatan ikatan lemah, lubang struktural, serta keterlekatan. Kelebihan teori ini adalah kemampuannya menjelaskan peran relasi sosial dalam tindakan ekonomi dan keputusan kolektif secara rinci serta fleksibilitasnya dalam pengembangan desa wisata, namun kekurangannya adalah kecenderungan mengabaikan faktor struktural makro seperti kebijakan negara atau tekanan pasar global, yang dapat menyulitkan penerapannya dalam analisis relasi sosial.

Penelitian relevan lainnya mencakup kajian Kurnia Alvin dan Muhammad Farid (Alvin Syahputra & Farid Ma, 2020) yang menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai di Kabupaten Blitar menggunakan teori dari Morse and Stephens yang meliputi tahapan *Assessment, Initiation, Deliberation, dan Implementation*. Teori ini unggul dalam menyediakan struktur sistematis untuk kolaborasi antarlembaga dan mendorong partisipasi aktif demi kebijakan inklusif serta adaptif, namun memiliki kelemahan terkait ketergantungan pada komitmen aktor, potensi kendala dari perbedaan kepentingan, sumber daya tidak merata, dan koordinasi yang lemah. Selanjutnya, penelitian Muhammad Jawwadul dan Deby Febriyan (JAZULI, et.al. 2024) mengkaji *intergovernmental relations* dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DIY, menggunakan teori Wright yang terdiri dari lima elemen: *the roles of government, the interaction of public officials, sustainability communication, the roles of administrator, dan focus attention on the policy*. Kelebihan teori ini adalah kemampuannya menjelaskan kompleksitas koordinasi lintas level pemerintahan serta pentingnya komunikasi dan peran birokrat, namun cenderung bersifat deskriptif dan normatif sehingga kurang menyoroti dinamika konflik kepentingan atau ketimpangan kekuasaan.

Meskipun memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu jejaring pemerintahan dalam membangun sebuah rencana, pada penelitian ini peneliti melakukan di Kampung Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang. Dengan pertimbangan kekurangan dan kelebihan teori dari beberapa artikel sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk mengaplikasikan teori *Network Governance* dikarenakan dapat membantu peneliti dalam menganalisis peran dari stakeholder yang terlibat dan bagaimana kerja sama yang terjalin. Berdasarkan teori *Network Governance* menurut Kinji dan Koppenjan yang menjelaskan konsep dalam teori tersebut dalam beberapa konsep berikut: (Rossilawati 2024)

1. *Actors, Interdependency, and Frames*

Untuk mewujudkan network governance maka dibutuhkan jaringan yang melibatkan berbagai aktor dengan kewenangannya. Dalam suatu project, berbagai aktor tersebut tetap menjalankan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing - masing namun jaringan tersebut terjalin dengan adanya pertukaran sumber daya dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. *Network Management*

Manajemen jaringan dibutuhkan kerja sama antar aktor karena dalam jaringan tersebut terjalin interaksi dan pertukaran sumber daya sehingga perlu pengelolaan interaksi dengan memberikan ruang bagi aktor yang sedang bekerja sama dalam membangun tujuan atau kebijakan.

## 3. *Institutional Features*

Dalam kerja sama antar aktor pasti rentan terjadi masalah yang kompleks sehingga membutuhkan adanya regulasi yang mengatur berjalannya jaringan tersebut, karena berhubungan dengan cara aktor berperilaku, pertukaran sumber daya dan batasan dalam pelaksanaannya. Regulasi dapat berupa undang - undang yang menjadi pedoman jaringan untuk menjaga tindakan yang dilakukan dalam tata kelola jaringan tetap terjalin dengan baik.

## 4. *Interactions and Complexity*

Berkaitan dengan hasil interaksi antar aktor yang kompleks dan saling ketergantungan sehingga dapat memberikan output yang berkelanjutan dan memberikan impact yang merata seperti kebijakan atau program.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan budaya yang terjadi di Kampung Keramik Dinoyo, khususnya terkait perkembangan dan dampak pariwisata berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara holistik dan kontekstual, serta memberikan ruang untuk mengeksplorasi persepsi, makna, serta praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat lokal dan pengunjung (John W. Creswell & J. David Creswell, 2017) Observasi penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Keramik Dinoyo yang bertempat di Jl. Mt Haryono 9 No.336, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Kampung Keramik Dinoyo pada hari Selasa, 29 April 2025 untuk mengamati variasi aktivitas wisata dan interaksi antara masyarakat dan wisatawan. Observasi bersifat non-struktural, di mana peneliti mencatat perilaku, suasana, interaksi sosial, bentuk partisipasi warga dalam kegiatan wisata, serta bagaimana kampung tersebut ditata sebagai objek wisata. Pendekatan observasi ini memberikan gambaran konkret mengenai dinamika kehidupan sosial serta bentuk keberdayaan komunitas lokal dalam mengelola potensi pariwisata (Sugiyono, 2023).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara purposive sampling.

**Table 1. Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1.	Samsul Arifin	Laki-laki	Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Kampung Wisata Dinoyo
2.	Juandi	Laki-laki	Pos Upaya Kesehatan Kerja
3.	Anis	Laki-laki	Penjual Keramik Rumahan

Kriteria pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman mereka dalam kegiatan wisata di kampung tersebut. Jika memungkinkan, peneliti juga mewawancarai pihak dari Dinas Pariwisata Kota Malang atau lembaga lain yang terlibat dalam pengembangan Kampung Keramik Dinoyo sebagai destinasi wisata. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif dan pengalaman yang beragam.

Untuk memperkuat data lapangan, digunakan pula teknik studi dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi: (1) Arsip promosi pariwisata Kampung Keramik Dinoyo, baik berupa brosur fisik maupun konten media sosial; (2) Laporan kegiatan dari komunitas pengelola wisata kampung; (3) Data statistik kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata atau sumber terpercaya lainnya; (4) Dokumentasi visual berupa foto atau video perkembangan kampung dari masa ke masa; (5) Artikel media cetak atau daring yang membahas dampak dan perkembangan pariwisata di lokasi ini.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Hans Gerd Ridder, 2014), yang meliputi tiga tahap utama yaitu: (1) Reduksi data: proses ini dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. (2) Penyajian data: disusun dalam bentuk naratif, tabel kutipan wawancara, dan temuan visual (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: kesimpulan diperoleh melalui interpretasi data dari temuan lapangan yang kemudian diverifikasi dengan triangulasi metode dan informan guna memastikan keabsahan data. Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di Kampung Keramik Dinoyo. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami pengelolaan pariwisata berbasis komunitas dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial-ekonomi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Actors, interdependency, and frames

Pengembangan Kampung Wisata Keramik Dinoyo merupakan hasil dari interaksi kompleks dan sinergi berbagai aktor yang memiliki peran, kepentingan, dan kerangka pandang masing-masing. Analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat, hubungan interdependensi di antara mereka, serta kerangka kerja yang mendasari tindakan mereka menjadi krusial untuk memahami dinamika pembangunan dan keberlanjutan kampung wisata ini. Aktor yang terlibat dalam pembangunan Kampung Wisata Keramik Dinoyo diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, komunitas warga, dan pihak swasta. Dari berbagai aktor tersebut memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing, yaitu :

#### 1. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan akselerator utama. Kontribusi mereka termanifestasi dalam beberapa bentuk. Pertama, penyediaan pelatihan dan pembinaan peningkatan kapasitas bagi para pengrajin, yang menurut narasumber dilakukan secara berkala.

"Pemerintah hanya memfasilitasi pelatihan, pameran, dan lainnya," (Pak Juandi, diwawancarai pada 29 April 2025).

Dari fasilitas yang diberikan menunjukkan peran suportif pemerintah. Kedua, pemerintah menyediakan platform promosi melalui event yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), seperti festival keramik tahunan.

"Festival keramik tiap tahun. Yang mana ini difasilitasi oleh Disporapar." (Pak Juandi, diwawancarai pada 29 April 2025).

Ketiga, pemerintah turut memfasilitasi infrastruktur, termasuk bangunan produksi dan, secara historis, pendirian pabrik keramik oleh Pemerintah Provinsi yang didukung UPT

Bidang Keramik. Pabrik ini, meskipun kini tidak beroperasi, menjadi cikal bakal konsentrasi SDM pengrajin di Dinoyo karena SDM sudah terbentuk, dekat dengan bahan baku yang ada di Malang Selatan. Keberadaan kampung wisata ini juga memudahkan pemerintah dalam mencari UMKM untuk diikutsertakan dalam berbagai pameran. Namun, persepsi mengenai dampak intervensi pemerintah dapat bervariasi di tingkat individu. Sebagai contoh, Pak Hadis, seorang pedagang keramik yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 2000 dengan basis produksi di Tlogomas dan Probolinggo, serta menjual produknya secara luring dan melalui Facebook di Dinoyo, merasakan kontribusi pemerintah lebih bersifat seremonial. Ia menyatakan:

"Kalau peran pemerintah ya cuma cetak tulisan yang digantung itu (merujuk pada papan nama dari BUMN/BRI). Saya ngerasa enggak ada dampak apa-apa selain papan nama BRI itu." (Pak Hadis, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

## 2. Masyarakat

Peran sentral dalam pengembangan Kampung Wisata Keramik Dinoyo dimainkan oleh masyarakat lokal, khususnya para pengrajin dan pedagang yang memiliki keterikatan historis dan ekonomi dengan kerajinan keramik. Komunitas ini tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai agen proaktif yang menggerakkan transformasi kawasan tersebut. Inisiatif fundamental untuk membentuk identitas "Kampung Wisata" secara eksplisit berasal dari dalam komunitas itu sendiri, sebuah manifestasi dari keinginan untuk meningkatkan nilai ekonomi serta keberlanjutan warisan budaya mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Juandi, seorang tokoh kunci yang memahami dinamika internal kampung,

"Yang mempunyai inisiatif Kampung Wisata yaitu paguyuban itu sendiri." (Pak Juandi, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

Pernyataan ini menggarisbawahi model pembangunan partisipatif *bottom-up*, di mana Paguyuban Pedagang dan Pengrajin, yang beranggotakan sekitar 25 individu dengan 10 diantaranya merupakan pengrajin langsung, tampil sebagai motor penggerak utama. Keberhasilan konsepsi Kampung Wisata ini secara signifikan membuka peluang-peluang usaha baru dan memperluas penyerapan tenaga kerja bagi warga setempat, mengukuhkan sektor kerajinan sebagai pilar ekonomi lokal. Lebih lanjut, untuk mengkonsolidasikan upaya kolektif dan mengoptimalkan potensi yang ada, masyarakat secara organik membentuk berbagai lembaga pendukung seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), yang bersama-sama dengan Paguyuban, menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang lebih terstruktur dan resilien. Resiliensi komunitas ini teruji, misalnya, selama periode krisis pandemi COVID-19, di mana para pengrajin menunjukkan kapasitas adaptif dengan melakukan introspeksi dan fokus pada peningkatan kualitas produk sebagai respons terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Kompleksitas model usaha di dalam kampung wisata ini juga patut dicatat, bervariasi dari unit usaha yang mengintegrasikan produksi dan penjualan di lokasi, hingga model yang lebih terdistribusi seperti yang dijalankan oleh beberapa pedagang yang sumber produksinya berada di luar area Dinoyo namun tetap menjadi bagian integral dari ekosistem penjualan di kampung wisata tersebut.

## 3. Perguruan Tinggi - Lembaga Pengabdian

Institusi eksternal, khususnya dari ranah akademik dan lembaga pengabdian masyarakat, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Politeknik Negeri Malang (Polinema), sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, memainkan peran strategis melalui implementasi

program pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial para pengrajin serta fasilitasi akses terhadap sumber-sumber permodalan. Lebih lanjut, kolaborasi antara institusi akademik dan sektor korporasi menghasilkan kontribusi infrastruktur fisik yang nyata, salah satunya adalah pembangunan taman di depan gedung utama Kampung Wisata Keramik Dinoyo, yang merupakan buah sinergi antara Polinema dan PT Pertamina (Persero). Proyek infrastruktur ini tidak hanya memindahkan tampilan fisik kampung wisata tetapi juga menambah fasilitas pendukung bagi pengunjung dan masyarakat setempat.

#### 4. BUMN - Bank BRI

Keterlibatan sektor korporasi, yang mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas swasta lainnya, menjadi salah satu pilar eksternal dalam dinamika pengembangan Kampung Wisata Keramik Dinoyo. BUMN seperti Bank BRI tercatat mengambil peran dalam penyediaan akses terhadap permodalan, memperkenalkan sistem pembayaran modern seperti QRIS, dan memberikan dukungan promosi melalui pembuatan identitas visual bagi para pelaku usaha. Keterlibatan BUMN dalam memberikan dukungan nyata ini dikonfirmasi oleh Pak Juandi, yang menyatakan:

"Pihak swasta di kampung ada BUMN/BRI. Pihak swasta membuatkan name board untuk usaha-usaha warga." (Pak Juandi, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

Lebih lanjut, kontribusi dari BUMN lain, seperti Pertamina dalam pembangunan infrastruktur taman, serta inisiatif dari sektor swasta murni dalam pengembangan aset digital berupa website untuk kampung wisata, menunjukkan diversifikasi bentuk dukungan dari ranah korporasi. Namun demikian, efektivitas program dan persepsi terhadap peran BUMN serta sektor swasta secara umum menunjukkan heterogenitas di tingkat pelaku usaha individual. Adaptasi dan penerimaan terhadap intervensi ini bervariasi, seringkali dipengaruhi oleh penilaian subjektif dan preferensi operasional masing-masing usaha. Sebagai contoh, Pak Hadis memberikan perspektif berbeda mengenai utilitas salah satu fasilitas yang disediakan:

"Dulu banget dibikinin QRIS dari BRI tapi sekarang enggak dipakai lagi karena ngerasa enggak efektif dan efisien, lebih enak transaksi langsung (*cash*)." (Pak Hadis, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

Pengalaman individual seperti yang diutarakan Pak Hadis ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi teknologi atau program bantuan tidak hanya bergantung pada ketersediaannya, tetapi juga pada persepsi pengguna akhir mengenai nilai tambah, efisiensi, dan kesesuaiannya dengan alur kerja serta preferensi transaksi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih personal dan adaptif dalam merancang program dukungan eksternal.

#### Network management

Pola kerja sama dalam jaringan Kampung Keramik Dinoyo menunjukkan bentuk kolaborasi yang bersifat horizontal dan komplementer, di mana masing-masing aktor memainkan peran sesuai kapasitas dan fungsinya tanpa dominasi tunggal. Melihat potensi dari kampung keramik dinoyo ini maka menjadi sebuah peluang bagi aktor - aktor untuk bekerja sama dan di kampung tersebut membentuk komunitas atau komite. Paguyuban Pedagang dan Pengrajin menjadi penggerak utama dalam aspek produksi, pelestarian, hingga promosi kerajinan keramik. Di sisi lain, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan dalam memperkuat aspek pariwisata lokal sebagai daya tarik tambahan yang mendukung sektor ekonomi kreatif. Pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) berperan sebagai fasilitator dan regulator, dengan menyediakan

pelatihan, pembinaan, pameran, serta dukungan kegiatan seperti Festival Keramik Dinoyo. Keterlibatan pihak swasta, seperti BUMN (BRI), serta institusi pendidikan seperti Polinema dan Pertamina, menunjukkan bentuk kemitraan strategis dalam bidang teknologi, promosi, dan penyediaan fasilitas umum. Keterlibatan dari aktor - aktor tersebut membentuk pola kerja sama, sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Samsul Arifin

“Peran pemerintah mewadahi potensi kampung dinoyo, kemudian bekerja sama dengan lembaga yang relasinya hanya bisnis, jasa pengiriman, bahan baku, dan pihak Bank BRI membantu permodalan dan akses pembayaran dalam bentuk QRIS.”

(Pak Samsul Arifin, Ketua Pokdarwis, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

Selain itu, masyarakat umum juga terlibat secara partisipatif, baik sebagai pelaku usaha baru maupun tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa kolaborasi dalam jaringan ini bersifat terbuka dan inklusif. Selain itu, manajemen network antar aktor tersebut juga dengan mengadakan pertemuan untuk membahas terkait keluhan dan laporan progres supaya Kampung Keramik Dinoyo tetap dalam pantauan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Samsul Arifin

“Pihak pemerintah melakukan pembinaan, pameran, pembiayaan kegiatan, dan pelatihan peningkatan yang diadakan dalam 2x satu tahun. Kegiatan pameran diadakan di Malang, Surabaya, Jakarta dengan kami diundang dan akomodasi telah disediakan”

(Pak Samsul Arifin, Ketua Pokdarwis, diwawancarai tanggal 29 April 2025)

Pola ini mencerminkan adanya tata hubungan yang dinamis dan berbasis kebutuhan lokal, di mana semua aktor saling melengkapi demi keberlanjutan kampung wisata keramik.

### **Institutional features**

Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di Kampung Keramik Dinoyo, Kota Malang, peran network governance menjadi sangat penting dalam menjalin kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana pasal 8 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang merupakan bagian integral dari pembangunan jangka panjang nasional. Artinya, setiap inisiatif atau proyek pariwisata, termasuk yang berbasis komunitas seperti di Kampung Keramik Dinoyo, harus selaras dengan dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan secara nasional maupun daerah.

Selanjutnya, regulasi lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata. Di dalamnya, termuat prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif, yang secara langsung mendukung pendekatan network governance. Melalui prinsip-prinsip tersebut, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor dan lintas aktor dalam rangka menciptakan ekosistem pariwisata yang dinamis dan berdaya saing, di mana masyarakat lokal tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan.

Dalam mengembangkan destinasi wisata seperti Kampung Keramik Dinoyo, pemerintah dan stakeholder terkait perlu mempertimbangkan tiga kriteria utama dalam pembangunan pariwisata agar mampu menarik minat wisatawan: (Prasetyo et al. 2020)

1. *Something to see*, yaitu keunikan atau daya tarik visual yang dapat dinikmati oleh pengunjung, dalam hal ini kekhasan kerajinan keramik dan suasana kampung tematik.
2. *Something to do*, berupa aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan, seperti membuat keramik secara langsung atau mengikuti tur edukatif.

3. *Something to buy*, yaitu keberadaan produk atau cendera mata khas yang bisa dibeli oleh wisatawan sebagai bentuk kenangan atau oleh-oleh.

Oleh karena itu, implementasi *network governance* dalam pengembangan pariwisata di Kampung Keramik Dinoyo tidak hanya menuntut adanya regulasi yang kuat, tetapi juga koordinasi dan kolaborasi antara pihak secara efektif. Pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan memiliki peran fasilitatif dan regulatif, sedangkan masyarakat lokal berperan dalam pengelolaan dan pelestarian nilai budaya serta warisan lokal. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas kreatif juga menjadi kunci dalam menciptakan daya saing serta inovasi produk wisata. Regulasi yang ada telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, namun keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh bagaimana aktor-aktor dalam jejaring tersebut saling berinteraksi dan membangun kepercayaan demi mencapai tujuan bersama.

### Interactions and Complexity

Pengembangan *Community-Based Tourism* (CBT) di Kampung Keramik Dinoyo menunjukkan pentingnya kolaborasi antar aktor melalui pendekatan *network governance*. Konsep *Community-Based Tourism* ini memiliki prinsip pembangunan tempat wisata yang berbasis masyarakat, salah satunya yaitu dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat (Harahab 2024). *Network Governance* berperan sebagai mekanisme koordinatif yang menghubungkan aktor-aktor mulai dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pariwisata Keramik Dinoyo yang berbasis komunitas. Terdapat tiga pilar utama dalam kolaborasi ini, yaitu masyarakat lokal (melalui Paguyuban Pedagang dan Pengrajin, Pokdarwis, dan Pos Upaya Kesehatan Kerja), pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang), serta sektor swasta (BUMN/BRI).

Paguyuban Pedagang dan Pengrajin, sebagai inisiator Kampung Wisata, berperan penting dalam pengorganisasian kegiatan komunitas dan pelestarian kerajinan. Pokdarwis mendukung dari sisi pariwisata, sementara Pos UKK memberikan dukungan aspek kesehatan kerja. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi justru menjadi aktor utama penggerak. Pemerintah sendiri berperan sebagai fasilitator melalui pelatihan, pembinaan, dan penyelenggaraan acara rutin seperti Festival Keramik. Namun, belum terdapat forum komunitas yang bersifat formal dan kelembagaan antara pengrajin dengan pemerintah, sehingga komunikasi masih bersifat insidental. Sektor swasta, meskipun keterlibatan terbatas, lembaga seperti BRI memberikan kontribusi dalam mendukung digitalisasi dan promosi, seperti melalui sistem pembayaran non tunai, pembuatan web dan pembuatan *name board*.

Implementasi *network governance* dalam pengembangan CBT di Kampung Keramik Dinoyo mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat, yang mana memberikan manfaat kepada aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (Agus Triana and Atthahara 2021). Masyarakat lokal terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata, peningkatan hidup, dan pelestarian budaya lokal. Namun, tantangan masih ada, seperti belum adanya forum dengan pemerintah secara formal, pendanaan yang berdasar pada swadaya masyarakat sendiri, minat masyarakat atau turis yang rendah ke Keramik Dinoyo, belum optimalnya dukungan promosi digital dan pemasaran online, serta lokasi kampung yang berada di pinggir kota, keterbatasan penataan kawasan, dan lemahnya akses pasar masih perlu diatasi untuk mencapai pengembangan yang optimal.

## KESIMPULAN

Pengembangan Kampung Wisata Keramik Dinoyo (KWKD) merupakan manifestasi dari praktik *network governance*, di mana keberhasilan dan tantangannya dapat dianalisis melalui empat konsep utama teori Kinji dan Koppenjan:

1. *Actors, Interdependency, and Frames*: KWKD melibatkan beragam aktor (Pemerintah, komunitas warga, swasta, akademisi) yang saling bergantung, bertukar sumber daya (keahlian, dana, fasilitas) demi tujuan bersama mewujudkan destinasi wisata keramik yang berkelanjutan.
2. *Network Management*: Pola kolaborasi bersifat horizontal dan komplementer, dengan komunitas sebagai penggerak utama dan pemerintah sebagai fasilitator. Meski demikian, mekanisme koordinasi formal antar pihak, terutama dengan pemerintah, masih perlu ditingkatkan.
3. *Institutional Features*: Regulasi pariwisata nasional dan daerah menyediakan kerangka hukum, namun efektivitas implementasi dan koordinasi di tingkat lokal menjadi kunci untuk mendukung inisiatif berbasis komunitas seperti KWKD.
4. *Interactions and Complexity*: Interaksi antar aktor telah menghasilkan pengembangan CBT dengan manfaat multidimensi. Namun, tantangan seperti pendanaan swadaya, minimnya forum formal dengan pemerintah, promosi digital yang belum optimal, dan keterbatasan infrastruktur menunjukkan kompleksitas dalam mencapai keberlanjutan dan dampak merata.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk optimalisasi dan keberlanjutan Kampung Wisata Keramik Dinoyo melalui penguatan *network governance*:

1. Formalisasi Koordinasi: Bentuk forum komunikasi rutin dan terstruktur antar semua pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan kolaboratif.
2. Peningkatan Kapasitas & Diversifikasi Pendanaan: Tingkatkan kualitas pelatihan (produksi, manajemen, pemasaran digital) dan cari alternatif sumber pendanaan di luar swadaya masyarakat (misalnya, APBD, CSR, investor).
3. Penguatan Pemasaran & Akses Pasar: Susun strategi pemasaran digital terpadu, kembangkan produk wisata inovatif, dan perluas jaringan pasar produk keramik.
4. Optimalisasi Infrastruktur & Penataan Kawasan: Tingkatkan kualitas infrastruktur pendukung (akses, fasilitas umum, signage) dan lakukan penataan kawasan yang lebih terintegrasi dan menarik.
5. Sinkronisasi Kebijakan: Pastikan regulasi dan rencana pembangunan pariwisata daerah secara eksplisit mendukung dan mengintegrasikan pengembangan KWKD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa PAndemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123-130. [https://www.academia.edu/42672824/Dampak\\_Covid19\\_Terdapat\\_UMKM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid19_Terdapat_UMKM_di_Indonesia)
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fada, H. L. N., Ghufrouddin, dan Danang Purwantara. (2023). Peran Jejaring Sosial Pemerintah Desa dalam Upaya Mewujudkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus di Desa Wisata Batik Girilayu, Kabupaten Karanganyar). *JSHP*, Volume 7 Nomor 2 Halaman 188-202.
- Hasanah, N., Fitri Kurnianingsih, dan Chaereyranba Sholeh. (2024). Networking Governance dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 1 Nomor 3 Halaman 308-319.



- Harahab, Nuddin, Dhiana Puspitawati, Adi Kusumaningrum, Supriyadi, Mentari Puspa, dan Asyifa Anandya. (2024). Konsep Community-Based Tourism dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari (Studi Kasus di Clungup Mangrove Conservation, Kabupaten Malang). *Journal of Fisheries and Marine Research*, 8 (1), hlm 7 - 19.
- Jazuli, M. J. H. & Deby Febriyan Eprilianto. (2024). Intergovernmental Relations dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Publika*, Volume 12 Nomor 1 Halaman 103-118.
- Maryanto, T., & Syahida, A. R. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1(1), 36-42.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prasetyo, A. R., Sukmawati, A., Mardha, H., & Anggita, T. (2020). Analisis Komponen Desa Wisata Kampung Keramik Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. *PANGRIPTA*, 3(2), 550-563.
- Rossilawati, R. S., & Hanani, R. (2024). NETWORK GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN IPM PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOGIRI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-20.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Syahputra, K. A. & Muhammad Farid. (2020). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Jurnal Publika*, Volume 8 Nomor 4 Halaman 1-10.
- Triana, Eva Agus dan Haura Atthahara. (2021). Implementasi Prinsip Community Owned Government Melalui Konsep Community Based Tourisme (CBT) dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulas Garden di Desa Sipedang. *The Indonesian Journal of Politic and Policy*, 3 (1), hlm 45 - 57.